

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN SILPA TERHADAP BELANJA
DAERAH : ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018 – 2023**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Zahratun Nisa Maulidiyah
NIM : 31402100115**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN SILPA TERHADAP BELANJA DAERAH : ANALISIS *FLYPAPER*
EFFECT PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018 – 2023**

Disusun oleh:

Zahratun Nisa Maulidiyah

NIM : 31402100115

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 08 November 2024

Pembimbing,



Hendri Setiawan, S.E, M.PA

NIDN. 0621018204

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN SILPA TERHADAP BELANJA DAERAH : ANALISIS FLYPAPER
EFFECT PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018 - 2023**

Disusun Oleh:

**Zahratun Nisa Maulidiyah
NIM 31402100115**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji 1

Penguji 2

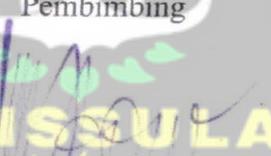

Mutoberoh, S.E., M.Sc., Akt

NIDN. 0603099101


Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Akt

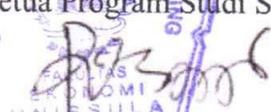
NIDN. 0612078902

Pembimbing


Hendri Setiawan, SE., M.PA

NIDN.0621018204

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 22 November 2024


Ketua Program Studi SI Akuntansi

Provita Wiyanti, SE., M.st., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP

NIDN. 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahratun Nisa Maulidiyah

NIM : 31402100115

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Daerah : Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2023”**. Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan plagiasi atau duplikasi karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 November 2024

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
B5E08AN0174979772

Zahratun Nisa Maulidiyah
NIM. 31402100115

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Daerah : Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah serta menganalisis fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 - 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan fenomena *Flypaper Effect* telah terjadi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran , Belanja Daerah, Flypaper Effect*

ABSTRACT

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap
Belanja Daerah : Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2023**

The purpose of this study is to determine the influence of Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Budget Financing Surplus on Regional Expenditure and to analyze the Flypaper Effect phenomenon in Regencies/Cities in the Riau Islands Province in 2018-2023. This study is a quantitative descriptive study with the type of data used is secondary data sourced from the official website of the Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. The population in this study were 7 Regencies/Cities in the Riau Islands Province with a sampling technique using purposive sampling. The sample used was 7 Regencies/Cities in the Riau Islands Province in 2018-2023. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of the study show that Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund have a positive and significant influence on Regional Expenditure while the Budget Financing Surplus has no effect on Regional Expenditure and the Flypaper Effect phenomenon has occurred in Regencies/Cities in the Riau Islands Province.

Keywords: Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Budget Financing Surplus, Regional Expenditure, Flypaper Effect.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Belanja Daerah : Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2023”**

Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA, IFP, AWP selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Hendri Setiawan, S.E, M.PA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan bimbingan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Cinta pertama sekaligus panutan hidup saya, ayahanda tercinta Satio, S.E. yang telah memperjuangkan banyak hal untuk anaknya. Terima Kasih untuk semua motivasi, doa, dan semua bentuk kasih sayang yang tak pernah kurang , serta dukungan untuk segala kesuksesan saya.
6. Pintu surgaku ibunda tercinta Siti Umayyah yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk anaknya pulang, memberikan banyak doa, dukungan, dan cinta yang tak pernah habis dalam keadaan apapun, serta dukungan untuk segala kesuksesan saya.
7. Adik tercinta Faiz Syahrul Ramadhan yang selalu memberi dukungan serta doa untuk keberhasilan dalam setiap langkah kakaknya.
8. Kakak terbaik Ninis Puji Lawati yang saya temui di perantauan ini, Terima Kasih untuk semua hal baik yang tidak bisa saya sebutkan dan selalu bersedia memberikan solusi untuk semua permasalahan yang saya hadapi.
9. Saudara tak sedarah Nandira Aisya, Febianda Rachmadhati, Anetta Michelia, dan Feby Pebriana yang selalu bersedia mendengarkan semua bentuk keluhan kesah penulis.
10. Sahabat terbaiku Tasya Putri, Uli Fairus, Dodi Setiawan, Puji Dimas, dan Defrian Ardiansyah yang selalu membuat saya merasa aman, nyaman, dan bahagia di perantauan sehingga saya bisa bertahan dengan semua tekanan yang ada, Terima kasih untuk semua warna warni serta pengalaman yang menyenangkan di Kota ini.

11. Durrotun Nasihah selaku teman semester akhir penulis, yang selalu bersedia memberikan masukan untuk semua kebimbangan dalam penyusunan skripsi, serta meyakinkan bahwa saya akan berhasil melewati semuanya.
12. Teman seperjuangan angkatan 2021 baik satu jurusan maupun lintas jurusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri Zahratun Nisa Maulidiyah yang telah bertahan dengan semua lika liku luka dan tidak menyerah dengan semua tekanan yang ada, maaf untuk semua paksaan dan terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada diri sendiri, orang tua, dan pihak-pihak terkait. *You're amazing, I'm really Appreciate everything that you do.*

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Semarang, 07 November 2024

Penulis,

Zahratun Nisa Maulidiyah

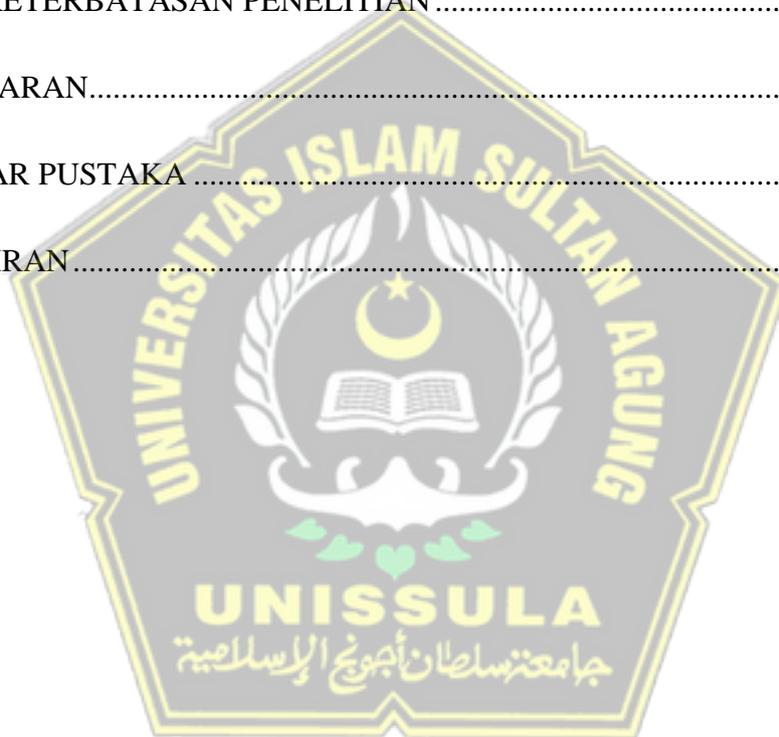
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 LANDASAN TEORI	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.2 TEORI VARIABEL	13

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.3 Dana Perimbangan.....	16
2.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	18
2.2.5 Belanja Daerah.....	19
2.2.6 <i>Flypaper Effect</i>	22
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	24
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN.....	27
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	27
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	28
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah	30
2.5 KERANGKA PENELITIAN TEORITIS.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 JENIS PENELITIAN	32
3.2 POPULASI DAN SAMPEL.....	32
3.2.1 Populasi.....	32
3.2.2 Sampel	32
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA	34
3.3.1 Sumber Data	34
3.3.2 Jenis Data.....	34

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA	34
3.5 VARIABEL DAN INDIKATOR	34
3.6 TEKNIK ANALISIS	36
3.6.1 Statistik Deskriptif	36
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.6.4 Uji Kelayakan Model.....	39
3.6.5 Uji Hipotetsis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
4.2 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA	42
4.2.1 Statistik Deskriptif	42
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
4.2.4 Uji Kelayakan Model.....	52
4.2.5 Uji Hipotetsis	53
4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah	55
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.....	56
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah.....	59

4.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah	60
4.3.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah	61
BAB V PENUTUP	63
5.1 KESIMPULAN	63
5.2 IMPLIKASI.....	64
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN	65
5.4 SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023.....	3
Tabel 1. 2 Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023.....	4
Tabel 1. 3 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	35
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas (Transform).....	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Park.....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Run Test.....	50
<i>Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda</i>	<i>50</i>
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F.....	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji T.....	53

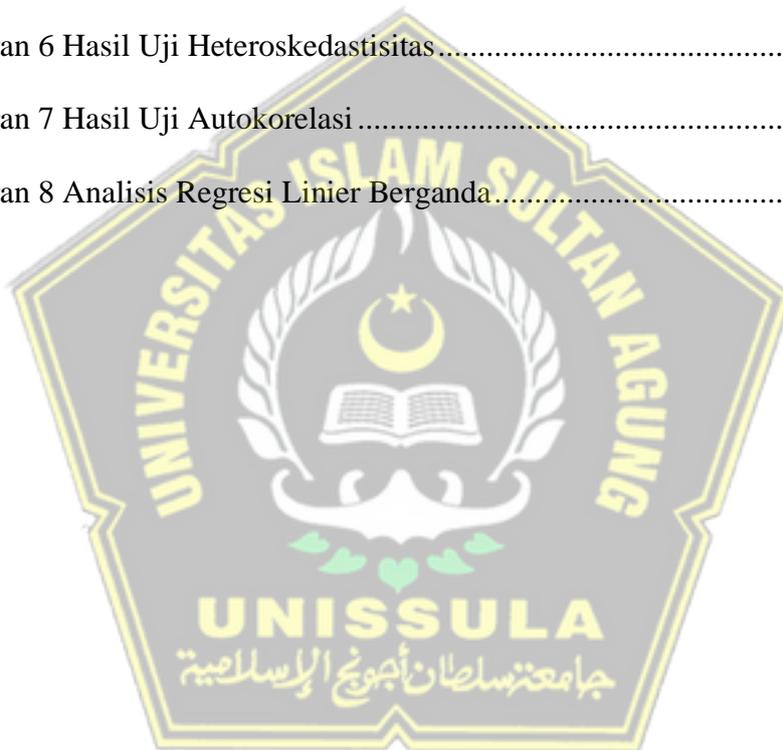
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kepulauan Riau Tahun 2018-2023	7
Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	71
Lampiran 2 Website sumber data.....	72
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas	75
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	78
Lampiran 8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengawasi daerahnya masing-masing. Kebijakan otonomi daerah merupakan sebutan untuk pendekatan ini. Tujuan pemberian kebijakan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dan lebih mampu menjalankan tugasnya di daerah, terutama dalam hal pembangunan masyarakat dan pelayanan yang meningkatkan stabilitas politik dan kohesi nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan peraturan formal mengenai kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan, salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Terdapat dua perspektif teori dalam penerapan desentralisasi fiskal yaitu *traditional theories (First-Generation Theories)* yang dipelopori oleh Samuelson pada tahun 1954,1955 dan *new perspective theories (second generation theories)* yang dikembangkan oleh Musgrave pada tahun 1959 dan Oates pada tahun 1972. Pada *traditional theories*, hal yang ditekankan adalah mengenai keuntungan dan desentralisasi dimana proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih efisien dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Sedangkan pada *new perspective theories* hal yang ditekankan ialah mengenai pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran antar tingkat pemerintahan (Puspita & Hamidi, 2021). Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, penyempurnaan kehidupan yang

berdemokrasi, keadilan, serta penyelenggaraan hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20% pada tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,05%. Dengan dua kota dan lima kabupaten, provinsi ini mengelola keuangan daerahnya dengan pendekatan desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya secara otonom. Menurut Wicaksono, (2012), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan keuangan.

Penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut (Abdul Jalil *et al.*, 2024). Rencana keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk di dalamnya APBD itu sendiri. Pemerintah Daerah dan DPRD bekerja sama menyusun Anggaran Belanja Daerah, yaitu kebijakan keuangan yang memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan keuangan masyarakat di setiap daerah. Pemerintah perlu mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur publik dan pertumbuhan ekonomi daerah (Suhartini, 2024) Mengingat kewenangan masing-masing daerah menentukan besarnya dana yang dibutuhkan untuk mendukung operasional daerah, belanja daerah yang terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat

dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat pembangunan suatu daerah. Belanja daerah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, atau pemerintah daerah digunakan untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Berikut ini adalah tabel kebutuhan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau selama enam tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023

TAHUN	KEBUTUHAN BELANJA DAERAH
2018	Rp. 3.419.790.000
2019	Rp. 3.653.940.000
2020	Rp. 3.855.200.000
2021	Rp. 3.703.820.000
2022	Rp. 3.842.590.000
2023	Rp. 4.276.980.000

(Sumber : djpk kemenkeu)

Dari data statistik Laporan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau di atas terlihat bahwa belanja daerah di provinsi ini tidak konsisten dan mudah berubah-ubah. Kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya pandemi *Covid-19* karena menimbulkan berbagai tuntutan daerah yang tidak terduga. Pemerintah daerah harus senantiasa memiliki rencana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi tuntutan belanja. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber penerimaan lain yang sah merupakan contoh sumber PAD (Asih & Irawan, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya alam seefisien mungkin jika ingin meningkatkan pendapatannya. Karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah berpendapatan per kapita tinggi (Abdul Jalil *et al.*, 2024). Realisasi pendapatan asli

daerah Provinsi Kepulauan Riau selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada laporan berikut.

Tabel 1. 2 Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2018	Rp. 1.220.770.000
2019	Rp. 1.311.700.000
2020	Rp. 1.195.640.000
2021	Rp. 1.375.770.000
2022	Rp. 1.675.730.000
2023	Rp. 1.806.830.000

(sumber: djpk kemenkeu)

Dari data statistik dalam laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau di atas dapat diketahui bahwa PAD Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan kondisi perekonomian yang belum stabil. Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, selain PAD sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Dana Perimbangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Besaran dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah juga berbeda-beda, mengingat masing-masing daerah di Indonesia memiliki APBD yang berbeda-beda (Putri & Haryanto, 2019). Untuk mencapai efektivitas APBD, daerah dapat melakukan pelacakan dan penghitungan penggunaan dana transfer dalam setiap APBD yang diterima. Dana Perimbangan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan fiskal, meningkatkan kemampuan daerah dalam

menggerakkan perekonomian, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan menyalurkan rencana pembangunan daerah karena daerah lebih memahami kebutuhannya sendiri (Suhartini, 2024). Data berikut menunjukkan realisasi transfer dana untuk Provinsi Kepulauan Riau selama enam tahun terakhir.

Tabel 1.3 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau 2018-2023

TAHUN	DANA PERIMBANGAN
2018	Rp. 2.278.000.000
2019	Rp. 2.626.460.000
2020	Rp. 2.317.190.000
2021	Rp. 2.406.530.000
2022	Rp. 2.241.140.000
2023	Rp. 2.361.790.000

(sumber : djpk kemenkeu)

Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam upaya pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi cenderung meningkat, berdasarkan statistik dari laporan realisasi Dana Perimbangan tersebut di atas. Keadaan ini dapat menimbulkan dugaan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggarannya. Di samping anggaran pendapatan dan belanja itu sendiri, keuangan merupakan salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pembiayaan pendapatan dan belanja daerah serta memberikan sumbangan terhadap belanja daerah (Solikin, 2016).

Salah satu komponen keuangan adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ditetapkan dengan cara mengurangi realisasi pendapatan anggaran dengan realisasi belanja dalam satu tahun anggaran. Kekurangan anggaran diisi dengan dana SILPA apabila pendapatan riil lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya

dibelanjakan. SILPA digunakan untuk membiayai inisiatif-inisiatif baru yang tidak tercantum dalam APBD murni atau untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, menurut (Rafi & Arza, 2023), SILPA digunakan untuk membiayai belanja daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan memenuhi komitmen lain yang harus dipenuhi dalam anggaran akhir tahun. Pendapatan daerah yang diharapkan melebihi jumlah yang dianggarkan menjadi salah satu penyebab terjadinya SILPA (Mianto & Priyadi, 2019).

Kebutuhan pembangunan daerah ditopang oleh anggaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang disalurkan sebagai Belanja Daerah (Abdul Jalil *et al.*, 2024). Penyaluran kas belanja daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hasil pengelolaan ini berupa peningkatan PAD yang bersama-sama dengan sumber pendapatan lainnya akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja pemerintah daerah. Perbandingan jumlah PAD dan Dana Transfer Provinsi Kepulauan Riau selama enam tahun terakhir ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 1. 1 Grafik perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kepulauan Riau Tahun 2018-2023

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, selama enam tahun terakhir, dana perimbangan yang dikirim dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah melampaui pendapatan daerah. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Terdapat indikasi bahwa belanja pemerintah daerah bereaksi secara asimetris terhadap perubahan Dana Transfer ini karena peningkatan jumlah uang yang ditransfer pusat ke daerah.

Pemerintah daerah sering kali menghadapi kondisi di mana penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka APBD lebih sedikit dibandingkan dengan pengendalian atas transfer dana dari pemerintah pusat saat menerapkan insentif fiskal di suatu wilayah. Fenomena ini disebut sebagai *Flypaper Effect* oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997), yang dikenal dengan ungkapan “Uang

Menempel di Tempat yang Tepat (Utami & Iskandar, 2021). Dalam membiayai pengeluaran daerah, pemerintah daerah cenderung bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang dapat menghambat potensi daerah itu sendiri. Menurut Eka Daddy Kurnia, (2013), tujuan utama dari dana transfer adalah untuk mendorong sektor industri yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi daerah, yang pada akhirnya meningkatkan PAD bagi masyarakat. Perkiraan pengeluaran daerah pada tahun berikutnya dapat dipengaruhi oleh fenomena *Flypaper Effect*. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap transmisi daerah dalam mengembangkan sumber pendapatannya sendiri (Zulfan & Maulana, 2019).

Penelitian tentang *Flypaper Effect* telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Melda & Syofyan, (2020) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja daerah, sedangkan PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang nyata. *Flypaper Effect* juga terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Menurut penelitian Abdul Jalil *et al.*, (2024), PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lokasi terjadinya *Flypaper Effect*. Menurut penelitian Rafi & Arza, (2023), belanja daerah dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan *Flypaper Effect* terlihat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan memasukkan variabel SiLPA yang digunakan untuk melanjutkan kegiatan yang tertunda, membiayai belanja daerah, melunasi utang yang harus dilunasi pada akhir tahun anggaran, dan mengisi program baru yang belum

memiliki anggaran dalam APBD, penelitian ini berupaya mengkaji topik tersebut. Temuan penelitian Rafi & Arza, (2023) menunjukkan bahwa SiLPA berdampak positif terhadap belanja daerah.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, khususnya penelitian Abdul Jalil *et al.*, (2024), penelitian ini mengkaji ulang komponen dana perimbangan DAU, DAK, dan DBH. Pemerintah pusat menyalurkan uang kepada daerah dengan tujuan untuk membatasi kebocoran fiskal, dan masing-masing komponen memiliki peran pembiayaan yang berbeda. Oleh karena itu, jika analisis Abdul Jalil *et al.*, (2024) hanya memanfaatkan DAU sebagai komponen dana perimbangan, maka ketiga komponen tersebut digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Helmayunita, (2020) yang mengungkapkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja daerah, sedangkan DBH dan DAU memiliki pengaruh. Meskipun demikian, penelitian Melda & Syofyan, (2020) menunjukkan bahwa DAK dapat memberikan pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Subjek penelitian ini, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2023 (5,20%) dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya sebesar 5,05%. Hal ini menjadi pembeda lainnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana variabel Y (Belanja Daerah) dan X (PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA) saling mempengaruhi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena *Flypaper Effect* terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, akan dilakukan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah. Selain itu, akan dibahas pula potensi *Flypaper Effect* di wilayah kajian. Berikut ini adalah beberapa topik penelitian yang dihasilkan dari permasalahan tersebut:

- 1) Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018–2023?
- 2) Seberapa besar ketergantungan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018–2023 terhadap Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil)?
- 3) Bagaimana dampak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018–2023??

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023.

- 2) Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut dana perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023.
- 3) Mengkaji pengaruh Dana Sisa Lebih (SILPA) terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis :

- a. Memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang isu-isu yang mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sebagai bahan pustaka, referensi, dan data tentang belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengelola APBD dan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Dapat memberikan wawasan dan informasi baru bagi para akademisi di bidang perekonomian daerah.
- c. Diharapkan para pembaca memperoleh wawasan baru dari penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dapat digunakan untuk menguji kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Hubungan antara prinsipal atau pihak pertama yang menugaskan kontrak dan mengeluarkan perintah, dan agen yang menerima dan menafsirkan instruksi kontrak sesuai dengan keinginan prinsipal merupakan inti dari teori keagenan, yaitu teori penjelasan, menurut (Hermanto, 2017). Carr & Brower menjelaskan bahwa model keagenan fundamental didasarkan pada dua asumsi (Halim & Abdullah, 2006);

- (1) berbasis perilaku, di mana prinsipal harus mengawasi aktivitas agen,
- (2) berbasis hasil, di mana imbalan ditawarkan untuk memotivasi agen untuk memenuhi tujuan prinsipal.

Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah memiliki posisi sebagai agen dimana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada masyarakat yang memiliki posisi sebagai principal. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah ialah terkait transparansi laporan keuangan yang menjadi alat penilaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan (Naraswari & Nyoman, 2023)

2.2 TEORI VARIABEL

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu pelayanan sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang akuntabel, luas, dan nyata (Palar *et al.*, 2017). APBD digunakan untuk menyusun rencana keuangan pemerintah atas pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran (Solikin, 2016). Di antara sekian banyak peran yang dimainkan oleh APBD adalah:

- a) Otorisasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- b) Peran perencanaan, di mana APBD berfungsi sebagai pedoman organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Peran pengawasan, yaitu sebagai standar untuk menilai sejauh mana pengelolaan pemerintah daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- d) Fungsi alokasi, yang berfokus pada penyaluran anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menghentikan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi.
- e) Fungsi distribusi, yang menjamin bahwa perencanaan anggaran daerah dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan etika.
- f) Fungsi stabilisasi, yaitu APBD digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), penyaluran dana cadangan, hasil penjualan aset daerah, penerimaan pinjaman daerah, pengembalian pinjaman daerah, dan pendapatan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan sebagian sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah lainnya. Sementara itu, pengeluaran dan belanja keuangan daerah merupakan beban yang melekat pada APBD. Dalam APBD, semua pendapatan dan belanja daerah harus direncanakan secara bruto. Sementara anggaran belanja daerah merupakan rencana belanja daerah yang harus disesuaikan dengan jumlah uang yang tersedia, anggaran pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang logis berdasarkan masing-masing sumber pendapatan daerah, namun tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan sumber lain yang sah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengatur hal tersebut dan berupaya memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengalokasikan dana

untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah sebagian besar bersumber dari:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan pembayaran secara langsung. Pendapatan pajak tersebut digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat (Rifai & Priono, 2022). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur bahwa pajak daerah dibedakan menjadi pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah provinsi. Pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air merupakan contoh pajak daerah. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota meliputi pajak eksploitasi bahan galian golongan C, perparkiran, penerangan jalan, hiburan, hotel, restoran, dan reklame.

b) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau izin khusus yang diberikan kepada orang atau badan usaha.

c) Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan

Halim, (2008) mendefinisikan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai pendapatan dari pengelolaan aset yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atau dari badan usaha milik daerah. Sumber pendapatan ini terdiri dari

penyertaan modal, lembaga keuangan (perbankan dan nonperbankan), dan pendapatan dari badan usaha milik daerah.

d) Tambahan Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah yang sah meliputi uang yang diterima dari komisi, potongan harga, dan penjualan atau pembelian lain atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan bunga, biaya layanan rekening giro, pendapatan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan juga termasuk.

2.2.3 Dana Perimbangan

Menurut (Hutagalung, 2016), subsistem keuangan negara meliputi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas dengan tetap menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal. Sebagai bagian dari kewenangan desentralisasi fiskal, Dana Perimbangan di Indonesia merupakan pembayaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 19, dana yang bersumber dari pendapatan APBN disalurkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi, khususnya untuk menutup kesenjangan fiskal antara APBN dan pemerintah pusat. Berikut ini adalah penyaluran Dana Perimbangan:

1) DAU (Dana Alokasi Umum)

Pemerintah daerah di Indonesia memperoleh pembiayaan pembangunan dari Dana Alokasi Umum. Menurut Hutagalung (2016), dana tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dengan menggunakan sistem yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum ditetapkan berdasarkan alokasi dasar dan kesenjangan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Untuk mengetahui kesenjangan anggaran, dilakukan perbandingan antara kemampuan dan kebutuhan keuangan daerah, sedangkan alokasi dasar didasarkan pada gaji aparatur pemerintah daerah.

2) DAK atau Dana Alokasi Khusus

Untuk membantu proyek-proyek yang berpusat pada masalah daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu jenis Dana Perimbangan yang disalurkan kepada daerah sesuai dengan prioritas nasional dan pendapatan APBN. Aturan Dana Alokasi Khusus didasarkan pada tiga kriteria, yaitu umum, khusus, dan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam APBD, kriteria umum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus mempertimbangkan kekhasan dan peraturan perundang-undangan daerah, dan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Menurut Ependi dkk. (2023), Dana Alokasi Khusus memberikan bantuan pada sejumlah bidang, termasuk infrastruktur, irigasi, sanitasi, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.

3) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam proses desentralisasi, dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 11, dana tersebut bersumber dari pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sumber pembiayaan DBH lainnya adalah sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, minyak, gas, dan panas bumi.

2.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pembiayaan, yaitu dana yang perlu dikembalikan atau pengeluaran yang harus dikembalikan dalam tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya. SILPA, yang merupakan bagian dari pembiayaan, dihitung dengan cara mengurangi pendapatan aktual dari pengeluaran yang dianggarkan untuk tahun tertentu. Surplus Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar mencerminkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, sehingga terjadi keterlambatan dana surplus yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan public (Amelia, 2022). Idealnya, SILPA harus bernilai nol saat menyusun APBD, yang menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan cukup untuk menutupi defisit anggaran. Jika SILPA tetap positif, berarti ada dana yang tidak terpakai untuk pembiayaan daerah; jika negatif, berarti pembiayaan neto belum sepenuhnya

menutupi defisit. Tujuannya adalah untuk menekan belanja daerah agar mencapai surplus pembiayaan anggaran nol (Irfansyah, 2020).

Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat sejumlah alasan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun ini. Antara lain untuk menutupi defisit anggaran, memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran yang ditetapkan, membayar bunga dan pokok utang obligasi daerah yang melebihi anggaran yang tersedia sebelum perubahan APBD, menyelesaikan kewajiban yang masih terutang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN sebagai akibat kebijakan pemerintah, mendukung program dan kegiatan yang tidak ada anggarannya, dan mendanai kegiatan yang capaian kinerjanya melampaui yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun berjalan. Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa SILPA merupakan hasil kelebihan penerimaan pendapatan daerah, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan sisa dana yang berasal dari dana pembiayaan yang belum terserap atau target kinerja yang belum tercapai.

2.2.5 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah meliputi pendapatan lain-lain yang dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu diganti oleh daerah. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman

belanja daerah ditetapkan dengan menggunakan standar harga satuan, standar analisis belanja, dan/atau standar teknologi. Komitmen belanja daerah meliputi dana untuk mendukung operasi pemerintah daerah, termasuk anggaran kesehatan, inisiatif pendidikan, infrastruktur, dan proyek lain yang terkait dengan pemerintah daerah. Jumlah yang dialokasikan diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber untuk melaksanakan belanja daerah meliputi pendanaan daerah, khususnya sisa pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan (Suhartini, 2024). Belanja daerah disusun dari anggaran kinerja yang menekankan pada pencapaian hasil dari masukan yang diharapkan. Pengelolaan belanja daerah yang memperhatikan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaannya diperlukan untuk membantu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui penyaluran dan penggunaan sumber daya yang tepat (Solikin, 2016). Belanja daerah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (2019):

- Belanja Operasional

Belanja operasional adalah belanja yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintah daerah yang sedang berjalan dan memberikan manfaat langsung. Rinciannya meliputi:

- a. Belanja Pegawai: Dana untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pegawai pemerintah daerah, termasuk upah dan tunjangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa: Dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun, seperti biaya

pemeliharaan, perjalanan dinas, serta beban yang didistribusikan ke pihak ketiga.

- c. **Beban Bunga:** Digunakan untuk melunasi bunga obligasi atau pinjaman yang telah diambil oleh pemerintah daerah.
- d. **Biaya Subsidi:** Digunakan untuk memberikan subsidi kepada industri atau pihak tertentu agar harga barang/jasa tetap terjangkau oleh masyarakat.
- e. **Pembayaran Hibah:** Dialokasikan untuk hibah kepada pemerintah pusat atau daerah lain, badan, lembaga, atau kelompok masyarakat untuk tujuan tertentu.
- f. **Belanja Dukungan Sosial:** Anggaran yang diberikan kepada individu, keluarga, organisasi, atau masyarakat untuk tujuan sosial.
- **Belanja Modal**
 Pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap yang memberikan manfaat di banyak periode akuntansi. Rinciannya meliputi:
 - a) **Pembelian Tanah:** Anggaran untuk tanah yang digunakan dalam operasi pemerintah daerah.
 - b) **Biaya Peralatan dan Mesin:** Anggaran untuk pengadaan peralatan kantor, teknologi, dan mesin dengan masa pakai lebih dari satu tahun.
 - c) **Biaya Konstruksi dan Pembangunan:** Digunakan untuk pembangunan struktur atau bangunan untuk operasi pemerintah daerah.
 - d) **Pengeluaran untuk Jaringan, Jalan, dan Irigasi:** Digunakan untuk pembangunan jalan, sistem irigasi, dan jaringan.

e) Biaya Tambahan untuk Aset Tetap: Dana untuk pembelian aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

- **Belanja Tidak Terduga**

Merupakan belanja yang digunakan untuk kebutuhan mendesak atau tidak terduga, seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan atau pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan daerah tahun sebelumnya.

- **Belanja Transfer**

Merupakan belanja yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) **Belanja Bagi Hasil:** Pembagian hasil pendapatan antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.
- b) **Belanja Bantuan Keuangan:** Anggaran yang dialokasikan untuk kerja sama daerah atau untuk tujuan tertentu lainnya.

2.2.6 Flypaper Effect

Fenomena *Flypaper Effect* dicetuskan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997) dengan frasa terkenal "Uang Akan Berlalu Saat Bertepatan (Utami & Iskandar, 2021). Abdul Jalil *et al.*, (2024) menggambarkan fenomena ini sebagai fenomena di mana pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana transfer untuk kebutuhan daerah tanpa memanfaatkan kapasitas daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Akibatnya, keterkaitan antara pembayaran transfer pemerintah pusat dan pendapatan atau belanja daerah menjadi terdistorsi. Efek Flypaper dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian finansial suatu daerah. Sementara daerah yang mandiri secara finansial terus

memaksimalkan kemampuannya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, dampak ini lebih umum terjadi di daerah dengan tingkat kemandirian finansial yang rendah. Kemandirian finansial suatu daerah ditunjukkan oleh rasio pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan relatif terhadap pendapatan daerah. Jika suatu daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, daerah tersebut dikatakan mandiri secara finansial. Di sisi lain, suatu daerah dianggap mandiri secara finansial jika porsi Dana Perimbangannya cukup besar dibandingkan dengan pendapatannya (Rambe et al., 2023). Kuncoro, (2007) menegaskan bahwa fenomena *Flypaper Effect* dapat dijelaskan oleh dua aliran pemikiran yang berbeda:

1. Metode birokrasi yang memperhitungkan sudut pandang pengambil keputusan publik saat menganalisis *Flypaper Effect*.
2. Model ilusi fiskal, yang meneliti fenomena flypaper dari sudut pandang masyarakat umum yang kurang familiar dengan anggaran pemerintah.

Menurut Mulya & Bustamam, (2016), perbedaan antara dua aliran pemikiran tentang *Flypaper Effect* adalah bahwa ketidakpedulian masyarakat terhadap pengeluaran dan pembiayaan daerah menyebabkan perubahan dalam cara pandang birokrat saat membuat keputusan. Efek Flypaper Efek ini berdampak pada suatu daerah sebagai berikut:

- 1) Menjadi penyebab defisit anggaran yang berkelanjutan;
- 2) Mengakibatkan eksploitasi sumber pendapatan daerah yang tersedia, yang berpotensi di bawah standar.
- 3) Menetapkan ketergantungan suatu wilayah pada pemerintah federal.

- 4) Respons yang berlebihan terhadap transfer uang karena kurangnya otonomi keuangan.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Variabel	metode	Hasil
1.	Abdul Jalil <i>et al.</i> , (2024)	Independen : - <i>General allocation funds</i> - <i>Original regional income</i> Dependen : - <i>Regional expenditure</i>	Metode penelitian: Analisis regresi linier berganda Objek penelitian: Laporan realisasi anggaran tahun 2012-2021 Jenis penelitian : Metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah - Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah - Terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2021
2.	Rafi & Arza (2023)	Independen : - PAD - DAU - DAK - SILPA Dependen: - Belanja Daerah	Metode penelitian: Analisis regresi linier berganda Objek penelitian : laporan realisasi	- PAD, DAU, DAK, dan SILPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah

			<p>anggaran Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dari tahun 2016 hingga 2020</p> <p>jenis penelitian : deskriptif kuantitatif</p>	<p>- terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.</p>
3.	<p>Naraswari Wira & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi (2023)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAK - PAD - SILPA <p>Dependen : Belanja Daerah</p>	<p>Metode penelitian: Analisis regresi linier berganda</p> <p>Objek penelitian: Seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) yang mempublikasikan laporan realisasi APBD tahunan selama periode 2019 hingga 2021.</p> <p>Jenis penelitian : pendekatan kuantitatif</p>	<p>- DAK, PAD, & SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah</p> <p>- Tidak terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i></p>
4.	<p>Melda & Syofyan (2020)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Pendapatan Asli Daerah <p>Dependen :</p>	<p>Metode penelitian: Analisis regresi data panel</p> <p>Objek penelitian: LKPD LRA 19 Kab/Kota di Sumatera Barat periode 2015 - 2018</p>	<p>- Secara parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</p> <p>- DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.</p>

		Belanja daerah	Jenis penelitian : Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis data dokumenter dan data sekunder	- Telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
5.	Ridho <i>et al.</i> , (2021)	Independen : - Local Ownsource Revenue - General Allocation Funds Dependen : Regional Expenditures	Metode penelitian: Analisis regresi linier berganda Objek penelitian: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018-2020 pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian : Penelitian kuantitatif berparadigma positivisme dengan jenis data dokumenter	- Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai positif dan berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara signifikan. - Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah - Tidak terdapat <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah karena Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-statistik yang lebih tinggi dibandingkan Dana Alokasi Umum.
6.	arimbi & Suhartini (2024)	Independen : • PAD • Dana Perimbangan (DAU & DAK)	Metode penelitian: analisis regresi data panel	- DAU dan SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> • SILPA <p>Dependen : Belanja Daerah</p>	<p>Objek penelitian: 44 Laporan Realisasi APBD selama empat periode yaitu tahun 2017– 2020 Jawa Tengah dan DIY</p> <p>Jenis penelitian : pendekatan kuantitatif asosiatif</p>	<p>- PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah</p> <p>- <i>Flypaper Effect</i> terjadi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 – 2020</p>
--	--	--	---	--

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan sumber penerimaan daerah lainnya yang dapat diterima. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan sendiri sumber keuangannya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tetap berpegang pada cita-cita desentralisasi. Salah satu sumber pembiayaan belanja daerah adalah pendapatan asli daerah, menurut Rafi & Arza, (2023).

Untuk mengelola keuangan, mencapai hasil keuangan yang menguntungkan, dan mengkomunikasikan hasil tersebut secara efektif kepada masyarakat sebagai pihak utama, pemerintah menurut teori keagenan harus mampu mengelola potensi

daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (Naraswari Wira & Nyoman, 2023).

Penelitian Melda & Syofyan, (2020), Abdul Jalil *et al.*, (2024), dan Ridho et al., (2021) menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Karena pendapatan asli daerah dan belanja daerah saling berkorelasi kuat, maka kenaikan pendapatan asli daerah akan mengakibatkan kenaikan pula belanja daerah. Teori berikut dapat disimpulkan dari sini.:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan sejumlah uang yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan daerah pada masa desentralisasi. Teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengelola keuangan dalam bentuk dana transfer yang digunakan untuk mendukung perekonomian daerah agar tercipta kinerja keuangan yang baik. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat berperan sebagai agen dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak utama (Naraswari Wira & Nyoman, 2023).

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum merupakan tiga kategori Dana Perimbangan menurut penelitian terdahulu. Dana Alokasi Umum memberikan dampak positif bagi Daerah menurut penelitian Mianto & Priyadi, (2019) dan Putri & Haryanto, (2019); Belanja Daerah memberikan dampak positif terhadap Dana Alokasi Khusus menurut Rafi & Arza, (2023) dan Melda & Syofyan, (2020); dan Belanja Daerah memberikan dampak positif terhadap Dana Bagi Hasil menurut Fadilah & Helmayunita, (2020).

Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memberikan dampak terhadap belanja daerah karena merupakan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya meningkat seiring dengan besarnya Dana Perimbangan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Uraian di atas memungkinkan untuk menyimpulkan hipotesis berikut.:

H2a: Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Dana Alokasi Umum.

H2b: Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Dana Alokasi Khusus.

H2c: Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Dana Bagi Hasil.

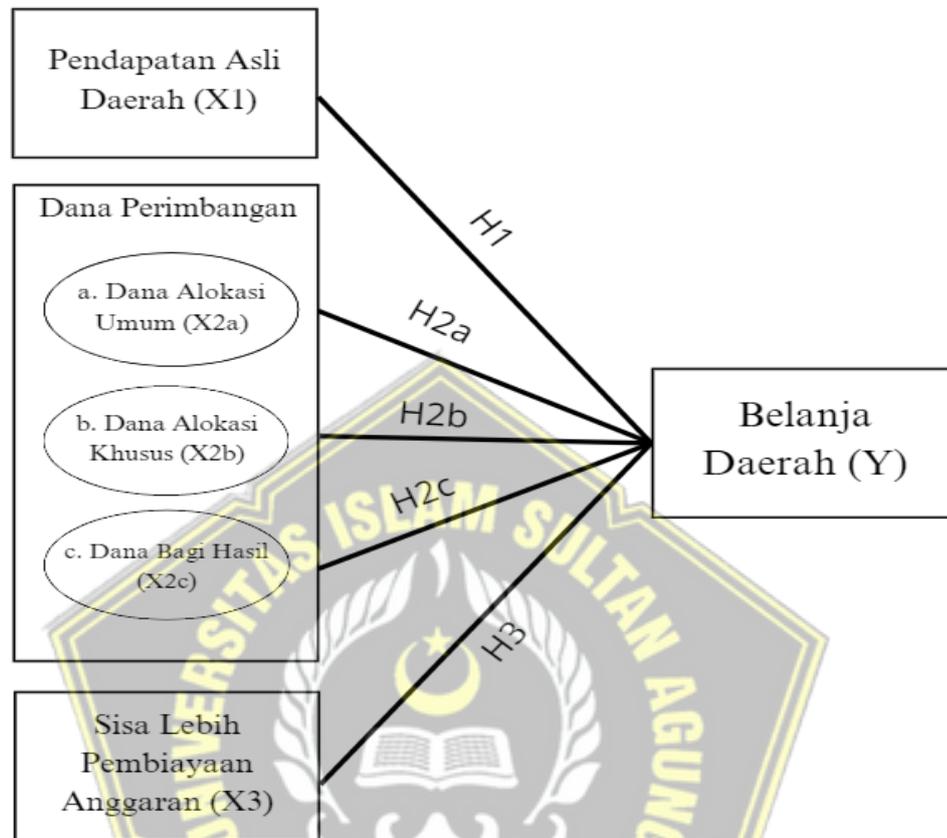
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa dana periode sebelumnya yang bersumber dari pendapatan daerah surplus, dana transfer, pendapatan daerah lainnya, dan penghematan belanja. Pelaksanaan belanja daerah dapat menjadi tantangan apabila pemerintah daerah tidak cermat dalam mengelola anggaran, yang ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang lebih besar (Olivia, 2023).

Menurut penelitian Rafi & Arza, (2023), Naraswari & Nyoman, 2023), dan (Solikin, 2016), belanja daerah dipengaruhi secara positif oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Ada dua cara untuk memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yaitu dengan melaksanakan proyek baru yang tidak diantisipasi sebelumnya dalam APBD murni atau dengan melanjutkan proyek yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini dikemukakan teorinya.:

H3 : SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

2.5 KERANGKA PENELITIAN TEORITIS



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk menggunakan data statistik, ciri-ciri, dan pola interaksi variabel untuk mengungkap fakta empiris. Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018–2023 menjadi basis data kuantitatif yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana, Surplus Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Daerah yang semuanya berimbang. Untuk mengetahui apakah fenomena *Flypaper Effect* terjadi di daerah tersebut dan bagaimana faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen, maka akan dilakukan analisis Laporan Realisasi APBD.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Sugiyono, (2013) mendefinisikan populasi sebagai kategori generalisasi yang meliputi objek atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti, yang darinya dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lima kabupaten dan dua kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.2 Sampel

Jumlah dan komposisi populasi mencakup sampel (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa penelitian ini

memenuhi tujuannya dan menghasilkan data yang representatif. Standar yang ditetapkan adalah:

a) Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyusun laporan APBD dan TKDD tahun 2018–2023.

b) Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018–2023 dapat dilihat pada situs web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sampel dipilih dari populasi saat ini, yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berikut:

1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Karimun
5. Kabupaten Lingga
6. Kabupaten Natuna
7. Kabupaten Kepulauan Anambas.



3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

3.3.1 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota yang mencakup dua kota dan lima kabupaten dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Data diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

3.3.2 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2013), data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, artinya tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen atau orang lain. Data penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018–2023.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan strategi dokumentasi, yaitu dengan membagikan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau pihak lain kepada masyarakat pengguna data. Sumber datanya adalah Laporan Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018–2023.

3.5 VARIABEL DAN INDIKATOR

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diikhtisarkan dalam table berikut:

Tabel 3. 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional Variabel	Pengukuran	Skala
Variabel Independen		
Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.	<p>PAD =</p> <p>Total Pajak Daerah +</p> <p>Total Retribusi Daerah +</p> <p>Total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah</p> <p>Sumber : Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (Rafi & Arza, 2023)</p>	nominal
Dana Perimbangan (X2) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi kesenjangan fiskal	<p>a. DAU = Celah fiskal + Alokasi Dasar</p> <p>b. DAK = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah</p> <p>c. DBH = DBH Pajak + DBH Bukan Pajak</p> <p>sumber : UU Nomor 33 Tahun 2004 (Marici <i>et al.</i>, 2022)</p>	nominal

<p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun periode anggaran.</p>	<p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto</p> <p>Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (Rafi & Arza, 2023)</p>	<p>Nominal</p>
<p>Variabel Dependen</p>		
<p>Belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.</p>	<p>Belanja daerah = Belanja operasi + belanja modal + belanja tak terduga</p> <p>Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (Rafi & Arza, 2023)</p>	<p>Nominal</p>

3.6 TEKNIK ANALISIS

Metode yang digunakan peneliti untuk menguji hipotesis penelitian disebut sebagai strategi analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data numerik, dan hasil perhitungan variabel didukung oleh penalaran yang menyeluruh. Teknik untuk menganalisis data adalah:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013), analisis statistik deskriptif merupakan suatu teknik pengumpulan, pemadatan, dan penyajian data secara deskriptif tanpa memerlukan generalisasi. Metode analisis ini akan memberikan gambaran awal mengenai

masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai terendah, dan nilai simpangan baku untuk masing-masing variabel akan ditampilkan dalam deskripsi data. (Syafriada, 2022)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah faktor pengganggu atau residual model regresi terdistribusi secara teratur (Ghozali, 2021). Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan menggunakan uji normalitas. Syarat-syarat uji normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, hipotesis diterima karena data terdistribusi secara teratur.
- 2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara teratur.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel independen. Model regresi yang tepat seharusnya tidak memiliki hubungan apa pun antar variabel independen. Uji multikolinearitas menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL) dengan nilai toleransi (TOL) $< 0,10$. Apabila nilai VIF melebihi atau sama dengan 10,00, model regresi tersebut menunjukkan multikolinearitas. (Ghozali, 2021).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan apakah residual varians dari satu pengamatan berbeda dari pengamatan lainnya. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metodologi Uji Park. Asumsi di balik pengambilan keputusan adalah jika koefisien parameter beta persamaan regresi signifikan secara statistik, maka heteroskedastisitas hadir. (Ghozali, 2021).

d) Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah galat-gagal yang mengganggu pada model regresi pada periode $t-1$ (prior) berkorelasi atau tidak, digunakan Uji Autokorelasi. Untuk mengetahui apakah data residual bersifat acak, dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan Uji Run. Berikut ini ketentuan Uji Run:

1. Residual bersifat acak jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi lebih dari 0,05.
2. Residual tidak bersifat acak jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. (Ghozali, 2021).

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara kategori independen dan dependen guna menunjukkan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil,

dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki dampak terhadap Belanja Daerah. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut.:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 SILPA + e$$

Keterangan :

- a) BD = Belanja Daerah
- b) PAD = Pendapatan Asli Daerah
- c) DAU = Dana Alokasi Umum
- d) DAK = Dana Alokasi Khusus
- e) DBH = Dana Bagi Hasil
- f) SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- g) α = konstanta
- h) β = regresi
- i) e = error (faktor pengganggu)

3.6.4 Uji Kelayakan Model

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat di mana model dapat memperhitungkan varians variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2). Kerangka pengambilan keputusan uji R^2 didasarkan pada:

Nilai koefisien mendekati nol berarti variabel independen memiliki kemampuan terbatas untuk menjelaskan variabel dependen; nilai mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir semua

informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2021).

b) Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi ANOVA yang akan menunjukkan apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan linier pada saat yang bersamaan (Ghozali, 2021). Hipotesis pengujiannya adalah:

Ho: Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen;

Ha: Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, Ho diterima (tidak berpengaruh);
- Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, Ho ditolak. (berpengaruh)

3.6.5 Uji Hipotesis

a) Uji T (Parsial)

Uji koefisien regresi parsial, yang terkadang disebut sebagai uji-T, digunakan untuk menentukan sejauh mana satu variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen (Ghozali, 2021)".

Asumsi mendasar dari uji ini adalah:

Ho: Pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen tidak terlihat.

Ha: Variabel dependen dan independen memiliki dampak substansial terhadap variabel independen jika digabungkan.

Standar pengambilan keputusan:

- Jika signifikansi lebih dari 0,05, Ho diterima (tidak berpengaruh);
- jika kurang dari 0,05, Ho ditolak (dipengaruhi).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui ada atau tidaknya Fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, serta mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan populasi yang digunakan adalah masyarakat di seluruh lima kabupaten dan dua kota di Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuh kabupaten/kota pada tahun 2018–2023, maka dalam penelitian ini digunakan data observasi sebanyak $7 \times 6 = 42$. Data tersebut bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau dan mencakup tahun 2018–2023 untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Daerah.

4.2 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maximum, minimum, rata-rata (mean), standar deviasi, dll. Berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini :

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum (Juta)	Maximum (Juta)	Mean	Std. Deviation
PAD	42	Rp. 27.000	Rp. 1.529.160	299.465.714.285,71	392.077.931.141,886
DAU	42	Rp. 364.340	Rp. 690.210	462.602.380.952,38	83.714.574.591,709
DAK	42	Rp. 74.060	Rp. 387.100	152.520.952.380,95	68.287.586.980,770
DBH	42	Rp. 96.520	Rp. 592.060	221.447.380.952,38	109.055.501.087,123
SILPA	42	Rp. 4.970	Rp. 270.600	89.603.809.523,81	62.445.438.465,380
BD	42	Rp. 784.990	Rp. 3.042.400	128.015.571.4285,71	595.216.398.283,904

Berdasarkan table 4.1, penjelasan hasil statistik deskriptif dari seluruh variabel adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah (X1)

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara minimum Rp 27.000.000.000 pada tahun 2023 (Kabupaten Kepulauan Anambas) sampai dengan maksimum Rp 1.529.160.000.000 pada tahun 2023 (Kota Batam). Rata-ratanya adalah Rp 299.465.714.285,71. Terdapat simpangan baku sebesar Rp 392.077.931.141,886. Terdapat variasi yang signifikan pada data ketika angka simpangan baku lebih besar dari nilai rata-ratanya.

b) Dana Alokasi Umum (X2a)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada table 4.1, Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai minimum sebesar Rp. 364.340.000.000 yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun

2018 dan nilai maximum sebesar Rp. 690.210.000.000 yaitu Kota Batam pada tahun 2023. Nilai mean adalah Rp. 462.602.380.952,38. Standar Deviasi adalah Rp. 83.714.574.591,709. Nilai mean lebih tinggi daripada nilai standar deviasi artinya variasi data tidak luas.

c) Dana Alokasi Khusus (X2b)

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.1, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp152.520.952.380,95, simpangan baku sebesar Rp68.287.586.980,770, dan nilai minimum sebesar Rp74.060.000.000, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, serta nilai maksimum sebesar Rp387.100.000.000, yaitu Kota Batam tahun 2022.

d) Dana Bagi Hasil (X2c)

Berdasarkan data deskriptif pada tabel 4.1, Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai minimum sebesar Rp96.520.000.000 pada tahun 2021 (untuk Kabupaten Lingga) dan nilai maksimum sebesar Rp592.060.000.000 pada tahun 2019 (untuk Kabupaten Natuna). Jumlah rata-ratanya adalah Rp221.447.380.952,38. Jumlah tersebut merupakan simpangan baku sebesar Rp109.055.501.087,123. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari simpangan baku, maka variansi datanya tidak terlalu besar.

e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)

Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai minimum sebesar Rp4.970.000.000,- yaitu Kabupaten Batuna

pada tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar Rp270.600.000.000,- yaitu Kota Batam pada tahun 2021, berdasarkan hasil data deskriptif pada tabel 4.1. Nilai rata-ratanya adalah Rp89.603.809.523,81. Terdapat simpangan baku sebesar Rp62.445.438.465,380. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari simpangan baku, maka variansi datanya tidak terlalu besar.

f) Belanja Daerah (Y)

Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara paling rendah Rp 784.990.000.000,- (Kabupaten Lingga tahun 2018) sampai dengan paling tinggi Rp 3.042.400.000.000,- (Kota Batam tahun 2023), berdasarkan hasil data deskriptif pada tabel 4.1. Rata-ratanya adalah Rp 1.280.155.714.285,71. Simpangan bakunya adalah Rp 595.216.398.283,904. Karena nilai rata-rata lebih besar dari simpangan baku, maka variansi datanya tidak terlalu besar.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) untuk Estimasi Dalam analisis regresi linier berganda, akan memberikan hasil Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi persyaratan Uji Asumsi Klasik (Ghozali, 2021). Uji Asumsi Klasik terdiri dari beberapa pengujian, seperti:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov Satu Sampel. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0002296
	Std. Deviation	72251103896.94
		429000
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.089
	Negative	-.167
Test Statistic		.167
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 ^c

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,005 ketika nilainya kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mengikuti distribusi normal. LN (Logaritma Natural) dari variabel dependen dan independen dapat digunakan untuk mengatasi data yang tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021). Variabel dependen dan independen dalam penelitian ini ditransformasi menggunakan Logaritma Natural. Selanjutnya, data tersebut diolah kembali menggunakan Logaritma Natural untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi secara normal, sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut.:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas (Transform)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09699030
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.071
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Semua data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal, sesuai dengan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan data logaritma natural. Nilai signifikansi sebesar 0,200, di mana nilai ini $> 0,05$, tercapai.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas melihat hubungan antara variabel independen. Model regresi yang tepat seharusnya tidak memiliki hubungan apa pun antara variabel independen. Uji multikolinearitas menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL) dengan nilai toleransi (TOL) $< 0,10$. Di sisi lain, skor VIF lebih dari 10,00 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi (Ghozali, 2021). Hasil uji multikolinearitas penelitian ini adalah sebagai berikut:..

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LNPAD	.317	3.150
	LND AU	.337	2.965
	LND AK	.373	2.684
	LND BH	.619	1.616
	LNSILPA	.683	1.465
a. Dependent Variabel: LNBD			

Temuan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai VIF setiap variabel kurang dari atau sama dengan 10, khususnya variabel PAD (X1) sebesar 3,150; DAU (X2a) sebesar 2,965; DAK (X2b) sebesar 2,684; DBH (X2c) sebesar 1,616; SILPA (X3) sebesar 1,465; dan nilai toleransi setiap variabel lebih besar dari atau sama dengan 0,10, khususnya variabel PAD (X1) sebesar 0,317; DAU (X2a) sebesar 0,337; DAK (X2b) sebesar 0,373; DBH (X2c) sebesar 0,619; SILPA (X3) sebesar 0,683. Karena tidak ada indikasi multikolinearitas dalam variabel independen, kita dapat menarik kesimpulan ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan apakah residual dari satu pengamatan berbeda dari residual dari pengamatan lain dalam hal varians, digunakan Uji Heteroskedastisitas. Uji ini disebut homoskedastisitas jika varians antara residual dari satu pengamatan dan pengamatan lain tetap konstan, dan disebut heteroskedastisitas jika varians antara residual dari satu pengamatan dan pengamatan lain berubah. Temuan

berikut diperoleh ketika heteroskedastisitas dideteksi dalam penyelidikan ini menggunakan uji Park. :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Park

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-119.606	112.999		-1.058	.297
	LNPAD	-.183	.646	-.081	-.283	.779
	LND AU	6.395	4.655	.381	1.374	.178
	LND AK	-2.087	1.943	-.283	-1.074	.290
	LND BH	.346	1.354	.052	.255	.800
	LNSILPA	-.370	.583	-.123	-.633	.530

a. Dependent Variabel: LNU2I

Berdasarkan hasil uji park diatas, semua variabel independen menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Untuk memastikan apakah kesalahan yang mengganggu dalam model regresi selama periode $t-1$ (sebelumnya) berkorelasi atau tidak, digunakan uji autokorelasi. Uji Run adalah uji autokorelasi yang digunakan. Residual dianggap acak jika tidak ada korelasi di antara keduanya; jika residual ini tidak acak, ditemukan korelasi dan autokorelasi. Hasil uji run adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00466
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	21
Total Cases	42
Number of Runs	18
Z	-1.094
Asymp. Sig. (2-tailed)	.274
a. Median	

Hasil output SPSS menunjukkan nilai test 0.00466 dengan probabilitas 0,274 signifikansi pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Temuan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dari analisis regresi linier berganda dalam studi ini harus memenuhi standar uji asumsi tradisional. Temuan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.429	4.024		-2.343	.025
	LNPAD	.133	.023	.458	5.790	.000
	LND AU	.800	.166	.370	4.824	.000
	LND AK	.175	.069	.185	2.537	.016
	LND BH	.275	.048	.323	5.695	.000
	LNSILPA	.028	.021	.072	1.330	.192

a. Dependent Variabel: LNBD

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$BD = -9.429 + 0.133 \text{ PAD} + 0.800 \text{ DAU} + 0.175 \text{ DAK} + 0.275 \text{ DBH} \\ + 0.028 \text{ SILPA} + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apabila variabel PAD (X1) naik sebesar 1%, maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,133, dengan syarat variabel bebasnya tetap. Hal ini dikarenakan nilai koefisien PAD (X1) sebesar 0,133 dengan nilai positif.
2. Apabila variabel DAU (X2a) tumbuh sebesar 1%, maka variabel belanja daerah (Y) juga akan naik sebesar 0,800, dengan syarat variabel bebasnya tetap. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien DAU (X2a) yang positif, yaitu sebesar 0,800.
3. DAK (X2b) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,175, artinya apabila variabel DAK (X2b) naik sebesar 1%, maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,175, dengan syarat variabel bebasnya tetap.
4. DAK (X2c) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,275 yang berarti apabila variabel DAK (X2c) naik sebesar 1% maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,275 jika variabel bebasnya tetap.
5. SILPA (X3) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,028 yang berarti apabila variabel SILPA (X3) naik sebesar 1% maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,028 jika variabel bebasnya tetap.

4.2.4 Uji Kelayakan Model

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) menghasilkan hasil berikut, yang menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.928	.918	.10351

Berdasarkan hasil uji R^2 yang disajikan pada tabel 4. Nilai adjusted R Square menunjukkan nilai 0,918 atau 91,8% artinya 91,8% dari nilai variabel dependen (belanja daerah) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, dan SILPA). Sisanya sebesar 8,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

b) Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi anova yang akan memberikan indikasi apakah variabel dependen memiliki hubungan linier terhadap variabel independen secara bersamaan. Berikut hasil uji statistik F :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F

	F	Sig.
Regression	93.372	.000 ^b

Dengan nilai F sebesar 93,372 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Surplus Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah, sesuai dengan tabel di atas. H_0 ditolak jika tingkat signifikansi di bawah 0,05.

4.2.5 Uji Hipotesis

c) Uji T (Parsial)

Uji parsial, yang sering dikenal sebagai uji-T, adalah uji koefisien regresi parsial yang digunakan untuk menentukan sejauh mana satu variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen. Uji statistik-T menghasilkan temuan berikut.:

Tabel 4. 10 Hasil Uji T

Coefficients ^a					
	Model	B	t	Sig.	Keputusan
1	(Constant)	-9.429	-2.343	.025	
	LNPA	.133	5.790	.000	Diterima
	LNDAU	.800	4.824	.000	Diterima
	LNDAK	.175	2.537	.016	Diterima
	LNDBH	.275	5.695	.000	Diterima
	LNSILPA	.028	1.330	.192	Ditolak

a. Dependent Variabel: LNBD

Terlihat jelas bagaimana masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat berdasarkan hasil uji t. Berikut ini disajikan penjelasannya:

1) Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 5,790. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018–2023, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2) Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 4,824. H_{2a} diterima dan H_0 ditolak, berdasarkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

3) Dampak Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Khusus

Hasil uji t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 dan nilai t sebesar 2,537". H_0 ditolak dan H_{2b} diterima, sesuai dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

4) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 5,695. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terbukti dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti H_2c diterima dan H_0 ditolak.

5) Dampak Surplus Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,192 dan nilai t sebesar 1,330. Sisa Anggaran Tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terbukti dari ditolaknya H_3 dan diterimanya H_0 karena nilai signifikansinya di atas 0,05.

4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data, terdapat hubungan positif dan substansial antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Hasil tersebut memenuhi taraf signifikansi kurang dari 0,05, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,133 dan nilai signifikansi 0,000. Jika dinyatakan sebaliknya, H_1 diterima karena bukti-bukti yang ada mendukung hipotesis yang diajukan.

Sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak utama, teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen harus mampu mengelola potensi daerahnya agar dapat memaksimalkan Pendapatan

Asli Daerah dan melakukan pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Pendapatan asli daerah dapat menjadi cerminan kapasitas daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang prospektif, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Apabila daerah dapat memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik, maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini akan memungkinkan belanja daerah meningkat. Selain itu, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Daerah.

Melda & Syofyan, (2020), Abdul Jalil *et al.*, (2024), dan Ridho *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan substansial terhadap Belanja Daerah, yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Suhartini, 2024) yang tidak menemukan adanya hubungan antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Belanja daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum, berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,800 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada

di bawah ambang batas signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut mendukung hipotesis yang baru diajukan, atau H2a.

Salah satu dana yang dikelola sesuai dengan teori keagenan, yang menjelaskan interaksi antara prinsipal dan agen, adalah Dana Alokasi Umum. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen harus mengelola sumber dayanya secara efektif. Jika dana tersebut dikelola dengan baik, pemerintah daerah akan mampu bertanggung jawab dalam menyediakan laporan keuangan kepada publik, yang selanjutnya akan menjadi standar penilaian kinerja keuangan pemerintah.

Ketimpangan keuangan di berbagai daerah menjadi akar penyebab ketimpangan fiskal di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum. Besaran Dana Alokasi Umum ditentukan oleh defisit anggaran dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai sumber utama pendapatan daerah di daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah. Dengan kata lain, daerah-daerah ini lebih bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Fenomena *Flypaper Effect* terjadi di daerah akibat Pemerintah Daerah mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Fenomena *Flypaper Effect* dapat diketahui dari perbandingan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki nilai Dana Alokasi Umum yang tinggi diduga

mengalami fenomena ini. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, nilai Dana Alokasi Umum lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga menunjukkan adanya fenomena *Flypaper Effect* di daerah tersebut. Adanya fenomena *Flypaper Effect* pada suatu daerah memiliki arti bahwa daerah cenderung menggantungkan kebutuhan daerahnya pada dana transfer dari pusat daripada memanfaatkan potensi daerahnya. Tujuan awal dana transfer Pemerintah Pusat adalah agar daerah dapat memanfaatkannya untuk dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya fenomena *Flypaper Effect* menjadikan hal ini tidak sejalan dengan tujuan tersebut.

Namun, melalui Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhannya daerahnya. Dengan demikian, semakin besar DAU yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, belanja daerah diperkirakan dipengaruhi oleh DAU dan akan meningkat seiring dengan peningkatan DAU.

Sejalan dengan penelitian Rafi & Arza, (2023), Mianto & Priyadi, (2019), dan Putri & Haryanto, (2019), DAU berdampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Temuan tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Leni, (2020) tidak menemukan adanya keterkaitan antara belanja daerah dengan DAU, dimana hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian ini.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,175 dan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang berada di bawah kriteria signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut menguatkan atau memvalidasi dugaan terbentuknya H2b.

Pemerintah daerah sebagai agen harus mengawasi Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang merupakan aspirasi utama. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tolok ukur kinerjanya.

Merupakan dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui APBN, Dana Alokasi Khusus harus digunakan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan pelayanan publik yang diperoleh melalui belanja daerah yang digunakan untuk Infrastruktur jalan dan jembatan, keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan. Alokasi Khusus digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain perdagangan, pertanian dan perikanan, kelautan, kehutanan, infrastruktur perdesaan, irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus, dan semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin besar pula Belanja Daerah. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian Melda & Syofyan, (2020) dan Rafi & Arza, (2023) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Namun, Dana Alokasi Khusus hanya berpengaruh kecil terhadap belanja daerah, sebagaimana penelitian Fadilah & Helmayunita, (2020).

4.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil sebesar 0,275 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas signifikansi kurang dari 0,05. Jika dinyatakan sebaliknya, bukti tersebut mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga H2c tepat.

Teori keagenan digunakan untuk mengkaji interaksi antara agen dan prinsipal. Dana Bagi Hasil merupakan dana transfer yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah, merupakan salah satu dana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelolanya. Dana ini selanjutnya akan menjadi standar penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dan akan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat.

Dana Bagi Hasil digunakan oleh pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini, pemerintah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat. Upaya pengalokasian terhadap pembangunan sarana dan prasana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pengeluaran

daerah dalam bentuk Belanja Daerah, maka dari itu Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Meskipun Melda & Syofyan, (2020) tidak menemukan adanya pengaruh dana bagi belanja daerah, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadilah & Helmayunita, (2020) dan Monica & Sa'roni, (2022) yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

4.3.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Belanja daerah tidak dipengaruhi oleh sisa lebih pembiayaan anggaran, berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,028 dan nilai signifikansinya sebesar 0,192 yang berada di bawah ambang batas signifikansi $<0,05$. Oleh karena itu, karena bukti tersebut bertentangan dengan hipotesis yang ditetapkan, maka H3 dapat dianggap ditolak.

Teori keagenan menyatakan bahwa agar pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal, maka pemerintah daerah harus mengelola anggaran daerahnya secara efisien. Pada dasarnya, SILPA dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah menjalankan fungsi agennya. Karena keterbatasan kapasitas, tujuan mendesak lainnya, batasan regulasi, dan ketidakpastian yang direncanakan, SILPA tidak berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut bisa memunculkan konflik kepentingan

antara pemerintah daerah sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai prinsipal karena masyarakat menganggap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak digunakan untuk kepentingan publik.

Dari besarnya nilai SILPA terlihat bahwa daerah tersebut belum merencanakan dan melaksanakan anggarannya dengan baik. SILPA lebih diutamakan untuk menutupi defisit anggaran daripada untuk mendanai penyaluran belanja daerah apabila realisasi pendapatan daerah melebihi anggaran awal. Terbentuknya SILPA terjadi apabila daerah tersebut memiliki surplus pada APBD tahun berjalan. Pada data penelitian, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cenderung rendah. Artinya, ketika suatu daerah memiliki nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang rendah, suatu daerah telah menganggarkan APBD nya dengan efektif sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak lagi menjadi sumber untuk mendanai kebutuhan daerahnya. Sisa dana tersebut akan digunakan apabila daerah tersebut mengalami defisit pada tahun berikutnya sehingga dapat disimpulkan bahwa SILPA tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Rafi & Arza, (2023) dan Naraswari & Nyoman, (2023) menunjukkan bahwa SILPA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang bertolak belakang dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Marici et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa Surplus Pembiayaan Anggaran tidak memberikan dampak yang nyata terhadap belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena *Flypaper Effect* telah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 hingga 2023 Serta mengetahui bagaimana pengaruh surplus pembiayaan anggaran, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, serta pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut::

1. Sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah, pendapatan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah.
2. Belanja daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh dana alokasi umum, yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerah.
3. Untuk membantu kebutuhan pelayanan publik tertentu, pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah yang direalisasikan melalui belanja daerah. Maka dapat dikatakan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
4. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga akan mempengaruhi pengeluaran daerah dalam bentuk Belanja Daerah.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah karena nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cenderung rendah yang artinya daerah telah menganggarkan APBD dengan efektif sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak lagi menjadi sumber kebutuhan daerah dan prioritas penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah untuk menutup defisit anggaran yaitu ketika realisasi anggaran lebih tinggi daripada anggarannya.
6. *Flypaper Effect* terjadi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

5.2 IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

- Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan tentang pengelolaan keuangan daerah karena membahas tentang pengaruh pendapatan asli daerah, surplus anggaran, dan dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) terhadap belanja daerah.
- Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena *Flypaper Effect* yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, suatu daerah sering kali menggunakan lebih banyak dana transfer dari pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerahnya.

2. Implikasi Praktis

- Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai acuan dalam mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. .

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Karena penelitian ini masih mengandung kekurangan dan keterbatasan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah keterbatasan penelitian ini:

- 1) Data residual tidak normal, menurut hasil uji normalitas, sehingga harus diubah ke bentuk Logaritma Natural (LN) agar dapat memberikan hasil data yang terdistribusi secara normal. Hal ini akan memungkinkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Karena setiap lokasi memiliki kualitas yang unik, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada daerah lain.

5.4 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang beragam yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dalam penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian.
- 2) Untuk menghasilkan perbedaan pada penelitian baru, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang penyaluran pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Agar tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, diharapkan pula pemerintah dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil Hutagalung, Raina Linda Sari, M. S. (2024). Flypaper Effect On The Influence Of General Allocation Funds And Original Regional Income On Regional Expenditure Of North Sumatra Province. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 5–24. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab 2.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab%202.Pdf)
- Amelia, F. (2022). *Analisis Silpa Sebagai Alat Ukur Pengelolaan Apbd Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar*. Ii(1), 1–20.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Eka Daddy Kurnia. (2013). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Ub*, 1(2), 1–15.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i3.273>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hermanto, Suwardi Bambang. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1. <https://doi.org/10.33701/Jipwp.V42i1.137>
- Irfansyah, A. (2020). *Analisis Faktor Penyebab Silpa Dan Silpa Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*. 4(1), 57–73.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja Daerah.” *Kementerian Keuangan*,

51(1), 212.

- Kuncoro, H. (2007). *Aspp-08 1 Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. June. <https://www.researchgate.net/publication/265288276>
- Leni, & S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Marici, S., Bastian, E., & Taqi, M. (2022). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 58–77.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i2.252>
- Mianto, A. P., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh Flypaper Effect DAU, PAD, Silpa Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Atau Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–20.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819. <https://doi.org/10.20527/Jiep.V5i2.7031>
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 1(2), 1. <http://jim.unsyiah.ac.id/Eka/Article/View/1067>
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1126>
- Naraswari Wira, P. E., & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. (2023). Analisis Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 115–125. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68938>
- Olivia, A. (2023). *Pengaruh DBH, Silpa, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb)*,. 1(4).

- Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, 1 (2020). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/162792/Permendagri-No-77-Tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, (2019). <https://Doi.Org/10.1093/Oed/9600622025>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Putri, A. I., & Haryanto. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1–15. <http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting>
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427. <https://Doi.Org/10.24036/Jea.V5i1.649>
- Rambe, R. A., Purmini, & Hutapia. (2023). Fenomena Flypaper Effect Pada Provinsi Yang Mengalami Pemekaran Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 31(1), 115–128. <https://Doi.Org/10.25105/Me.V31i1.18308>
- Ridho, M. R., Riwijanti, N. I., & Eltivia, N. (2021). The Flypaper Effect In Central Java , Indonesia : Did It Happen Or Not ? *International Journal Of Innovative Science And Research Technology*, 6(12), 815–819.
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(2), 434. <https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V6i2.556>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Solikin, A. (2016). 187-340-1-Pb (7). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 11–25.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suhartini, Putri Arimbi & Dwi. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan &

Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i5.1723>

Syafrida, Syahir Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*.

Utami, S., & Iskandar, D. D. (2021). Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 202–218. <https://doi.org/10.14710/Jdep.3.3.202-218>

Uu Nomor 33 Tahun 2004, 4 121 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Wicaksono, K. (2012). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>

Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh Ditinjau Dari Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus. *Inovasi*, 15(2), 188–197.

